

BAB II,

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi, Teori, Dasar

1. Pengertian Implementasi,

Implementasi, adalah proses menjalankan atau menerapkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi adalah tindakan nyata untuk mewujudkan rencana yang telah disusun dengan matang dan rinci. Dengan kata lain, implementasi adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan agar rencana tersebut dapat terlaksana sesuai tujuan yang diinginkan. (Mokodompit, 2023) Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah tindakan nyata untuk menjalankan rencana yang telah disusun sebelumnya. Tujuan dari implementasi adalah untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat secara langsung (*output*), seperti produk atau layanan, serta membawa dampak atau perubahan yang lebih luas (*outcome*), seperti peningkatan kualitas hidup atau efisiensi kerja. Karena melibatkan banyak pihak, langkah, dan faktor yang saling berkaitan,

implementasi sering kali menjadi proses yang kompleks.

Implementasi adalah proses menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan agar menjadi tindakan nyata dalam administrasi. Setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, implementasi menjadi tahap penting dalam proses kebijakan publik.(Sabilu, 2022) Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar keterlibatan berbagai pihak yang terkait, karena hal ini menentukan efektivitas kebijakan tersebut.

Implementasi atau pelaksanaan adalah proses menjalankan rencana atau kebijakan yang telah disusun secara matang. Ini bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan serangkaian tindakan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti aturan atau pedoman tertentu.(B. Usman, 2022) Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dengan melakukan implementasi yang baik, kita dapat memastikan bahwa rencana tersebut benar-benar terlaksana dan memberikan dampak positif sesuai harapan.

Implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Implementasi adalah proses menjalankan kebijakan yang telah

ditetapkan agar menjadi tindakan nyata dalam administrasi. Setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, implementasi menjadi tahap penting dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar keterlibatan berbagai pihak yang terkait, karena hal ini menentukan efektivitas kebijakan tersebut.(Setiawan, 2014)

Implementasi merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada efektivitas birokrasi dan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat.(Wahab, 2016)

a. Unsur-Unsur Implementasi

Unsur-unsur dari implemetasi kebijakan yang mutlak dan harus ada,(Tachjan, 2016) yaitu:

1.) Unsur pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan adalah proses menjalankan rencana yang telah ditetapkan oleh

pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari penentuan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, hingga evaluasi hasil. Setiap langkah memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.) Adanya Program Yang Dilaksanakan

Kebijakan publik tidak akan berarti, jika tidak diwujudkan melalui tindakan nyata. Tindakan ini biasanya berbentuk program atau kegiatan yang dirancang secara menyeluruh, mencakup rencana penggunaan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu. Program atau kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari kebijakan, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu. Tanpa pelaksanaan yang konkret, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

3.) Target Group Atau Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran (target group) adalah individu, kelompok, atau organisasi dalam masyarakat yang menjadi fokus utama dari suatu kebijakan publik. Mereka adalah pihak yang akan menerima manfaat langsung, seperti barang atau jasa, serta mengalami perubahan perilaku atau kondisi sebagai akibat dari penerapan kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kelompok sasaran merespons dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang diterapkan. Faktor-faktor seperti ukuran kelompok, tingkat pendidikan, usia, pengalaman, serta kondisi sosial-ekonomi dan budaya mereka dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi perumus kebijakan untuk memahami karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran agar kebijakan yang dibuat dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh mereka.

b. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi

Terdapat enam faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, (Winarno, 2017) yaitu:

1.) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan ukuran keberhasilan yang realistis. Jika tujuannya terlalu ideal atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka pelaksanaannya akan sulit dilakukan.

2.) Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan memerlukan sumber daya yang memadai, seperti tenaga kerja yang kompeten, dana yang cukup, waktu yang tersedia, serta fasilitas pendukung. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan sulit untuk diimplementasikan dengan baik.

3.) Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksana

Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai organisasi dan pihak yang terlibat sangat penting. Informasi mengenai kebijakan harus disampaikan dengan jelas dan konsisten agar semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka.

4.) Karakteristik Badan Pelaksana

Organisasi yang melaksanakan kebijakan harus memiliki struktur yang sesuai, staf yang kompeten, serta budaya kerja yang mendukung.

Jika organisasi tidak siap atau tidak memiliki kapasitas yang memadai, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.

5.) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Misalnya, situasi ekonomi yang sulit atau ketidakstabilan politik dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

6.) Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap dan motivasi individu yang melaksanakan kebijakan sangat berpengaruh. Jika mereka tidak memahami atau tidak setuju dengan kebijakan, mereka mungkin tidak akan melaksanakannya dengan baik.

c. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Terdapat lima faktor, yaitu:

1.) Komunikasi

Komunikasi dalam konteks kebijakan publik adalah proses penting untuk menyampaikan informasi, perintah, dan arahan dari pembuat kebijakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijakan tersebut. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dipahami dan dijalankan dengan benar oleh pelaksana di lapangan.

2.) Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan kebijakan atau program. Meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaannya akan menghadapi kesulitan dan bahkan bisa gagal. Sumber daya yang dimaksud meliputi jumlah dan kualitas staf pelaksana, informasi yang diperlukan, serta fasilitas pendukung lainnya.

3.) Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan mengacu pada kemauan dan motivasi mereka dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap kebijakan, respons terhadap implementasi, dan intensitas komitmen dalam pelaksanaannya.

4.) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur implementasi program kelembagaan. Dalam

hal ini, ada dua elemen Artinya, langkah rutin atau langkah operasi standar dan fragmentasi (beberapa bagian solusi/pemisahan).(Sujianto, 2018)

2. Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum (*curriculum*) berasal dari kata curir (pelari) dan curere (tempat berpacu), dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus di tempuh oleh seorang pelari mulai dari start-finish untuk memperoleh medali penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (*subject*) yang harus di tempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah (MKDP, 2011).

Secara Terminologi, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan adalah sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sebagai tanda bukti bahwa peserta didik telah mencapai standar kompetensi pendidikan yaitu dengan sebuah ijazah atau sertifikat (Baderiah, 2018). Kurikulum meliputi semua usaha sekolah yang berhubungan dengan pengalaman siswa

belajar dan yang terjadi bukan hanya dilingkungan sekolah, tetapi di luar sekolah.

Menurut Brown, kurikulum merupakan situasi dan kondisi yang tersedia bagi guru dan pengurus sekolah (administrator) untuk membuat tingkah laku yang berubah dari anak-anak dan pemuda melalui pintu sekolah. Payne juga mengatakan bahwa kurikulum itu terdiri dari semua situasi dimana sekolah dapat menyelidiki dan mengorganisir secara sadar untuk tujuan pengembangan kepribadian murid dalam membuat perubahan tingkah laku (Ahmadi, 2012).

Pendidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa kurikulum. Kurikulum menjadi bagian integral dari proses pendidikan. (Wahyuni, 2019) Sederhananya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan. Mereka mengatakan demikian karena kurikulum merupakan landasan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Tentu saja tanpa kurikulum tidak ada proses pembelajaran. Kemana perginya pendidikan di Indonesia jika tidak ada kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan dapat dikatakan sebagai acuan proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum tidak boleh dianggap remeh sebagai dokumen belaka, melainkan sebagai alat dan

bahan rujukan bagi para praktisi pendidikan untuk melaksanakan proses pendidikan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Bagaimana pendidikan bisa terselenggara dengan baik jika penyelenggara pendidikan sendiri tidak memahami kurikulumnya.

a. Fungsi kurikulum

Secara umum, fungsi kurikulum salah satunya yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan secara khusus, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara untuk memperlancar proses pelaksanaan pendidikan. Menurut Alexander Inglis, kurikulum memiliki 6 fungsi utama, yakni fungsi penyesuaian, pengintegrasian, diferensiasi, persiapan, pemilihan, diagnostik (Ainy, 2023).

1.) Fungsi Penyesuaian

Pada dasarnya individu hidup dalam suatu lingkungan yang selalu berubah-ubah. Setiap individu harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang pasti terjadi. Maka dalam hal ini fungsi kurikulum yakni sebagai instrumen pendidikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan setiap orang.

2.) Fungsi Pengintegrasian

Manusia memiliki beberapa aspek kompetensi, diantaranya yaitu aspek kompetensi, *kognitif, afketif dan psikamotorik*. Maka fungsi kurikulum adalah mengintegrasikan kompetensi yang dimiliki oleh manusia tersebut.

3.) Fungsi Diferensiasi

Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat.

4.) Fungsi Persiapan

Kurikulum berfungsi mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut, atau mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing dalam dunia kerja. Mempersiapkan kemampuan sangat perlu karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan oleh masing-masing peserta didik.

5.) Fungsi Pemilihan

Fungsi pemilihan ini memberikan kesempatan untuk memilih apa yang mereka

inginkan dan apa yang mereka minati. Kedua hal ini penting bagi masyarakat yang demokratis. Untuk mengembangkan keterampilan yang berbeda kurikulum perlu diatur secara luas dan fleksibel.

6.) Fungsi Diagnostik

Fungsi diagnostik dalam hal pendidikan maksudnya adalah membantu dan mengarahkan para peserta didik agar mereka mampu memahami apa yang kurang dan yang lebih pada dirinya, sehingga mengarahkan apa yang peserta didik harus lakukan.

3. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang lahir dari Kurikulum Darurat. Kurikulum ini dicetuskan oleh Kemendikbud pada tahun 2022 sebagai solusi untuk perbaikan pendidikan nasional. Konsep merdeka belajar dalam Kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Nadim Makariem adalah merdeka dalam berfikir. Guru sebagai komponen utama dalam pendidikan memiliki keleluasaan sendiri untuk merancang kurikulum sebelum diajarkan kepada peserta didik. Dengan guru mampu memahami esensi dari kurikulum yang diterapkan, maka guru akan

mampu menjawab kebutuhan masing masing peserta didik selama proses pembelajaran (siska Dkk, 2020).

Kurikulum Merdeka Menurut BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), kurikulum merdeka adalah kurikulum pembelajaran yang berkaitan dengan pendekatan bakat dan minat. Siswa/siswi dapat memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Merdeka belajar menjadi salah satu program inisiatif menteri pendidikan dan kebudayaan bapak Nadim Makarim yang ingin suasana belajar yang bahagia dan menyenangkan (Aan Widiyono, 2021).

Dalam pandangan H. Abdul Hamid Karim Amrullah (HAMKA), kata “merdeka” mempunyai tiga dimensi:

- a. Merdeka kemauan bermakna berani menyuruh, menyarankan menganjurkan dan menciptakan perkara yang baik dan diterima baik oleh masyarakat.
- b. Merdeka pikiran atau bebas menyatakan pikiran, yaitu melarang, menahan, mengkritik, mengaposisi yang mungkar.
- c. Kemerdekaan jiwa, bebas dari ketakutan (Kusnohadi, 2020).

Kurikulum merdeka memberikan warna baru dan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Guru

dituntut untuk memahami, secara menyeluruh konsep dari Kurikulum Merdeka Belajar ini. Dengan begitu, guru dapat menanamkan konsep kurikulum kepada peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat beradaptasi dengan penerapan kurikulum baru ini di sekolah. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum ini berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka diterapkan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir. Ini paling penting dari kemerdekaan berpikir ini ditujukan kepada guru (Khoirurrijal dkk, 2022).

1.) Komponen Kurikulum Merdeka

Merdeka belajar adalah wadah untuk saling bertukar informasi dan pengalaman khususnya bagi siswa/siswi Sekolah Dasar, agar dapat menambah wawasan serta membuka pola pikir menuju generasi unggul. Kemerdekaan belajar yang sesungguhnya ialah gabungan dari tanggung jawab, anatomi, dan otoritas, karena Merdeka Belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar (Ainia, 2020). Konsep merdeka belajar yaitu belajar bukan dinilai oleh besarnya angka tetapi oleh karya yang bermakna.

Menurut Abidah dkk. Terdapat empat komponen utama pada Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu sebagai berikut: (Indrajit, 2022)

- a.) Persyaratan kebijakan baru penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diterapkan untuk ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Hal ini memberikan kebebasan lebih bagi guru dan sekolah untuk menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat digunakan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
- b.) Penyelenggaraan UN tahun 2021 diubah menjadi penilaian kemampuan minimal dan survei kepribadian yang terdiri atas penguatan kemampuan berpikir verbal (literasi), kemampuan berpikir matematis (berhitung), dan pendidikan karakter. Ujian akan diadakan untuk siswa yang berada ditengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8 dan 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

c.) Guna mengubah istilah “Rencana Penyelenggaraan Pembelajaran” (RPP) menjadi “Modul Pendidikan”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menyederhanakannya dengan mengganti beberapa komponen. Kebijakan baru ini memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan lebih lanjut format modul pembelajaran. Modul dibuat secara efektif dan efisien sehingga guru mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.

d.) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas daerah dalam penerimaan peserta didik baru. Konfigurasi PPDB jalur zonasi 50%, minimal jalur terkonfirmasi 15%, dan jalur penalaran maksimal 5%. Namun performa Route 0-30% disesuaikan dengan kondisi setempat. Mendikbud ingin pemerintah daerah dan pusat bekerja sama untuk

menyamakan akses terhadap pendidikan berkualitas.

2.) Tujuan Kurikulum Merdeka

Tujuan Kurikulum merdeka adalah menjawab pertanyaan pendidikan masa lalu. Keberadaan kurikulum ini mendukung pengembangan potensi dan kemampuan siswa. Tujuan kurikulum merdeka meliputi: (Indrajit, 2022)

- a.) Berikan anak kebebasan untuk mengakses kebebasan belajar.
- b.) Mengembangkan kemampuan menciptakan peluang inovasi.
- c.) Menyiapkan siswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, kemajuan teknologi yang pesat, dan keterampilan siswa untuk bertahan hidup di dunia luar.
- d.) Memberi kesempatan kepada satuan pendidikan sekolah, guru, dan siswa untuk mempunyai kebebasan berinovasi dan belajar secara mandiri dan kreatif.

Kurikulum merdeka yang bertujuan untuk memulihkan pembelajaran juga memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih dan menyesuaikan perangkat

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dilembaganya, sehingga siswa dapat memperdalam konsepnya dan belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat belajarnya perkuat keterampilan Anda.

4. Tujuan Kurikulum Merdeka

Terdapat tiga tujuan utama dari Kurikulum Merdeka Belajar.

- a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, baik bagi siswa maupun guru. Kurikulum ini fokus pada pengembangan keterampilan dan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.
- b. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dalam pendidikan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Melalui kurikulum ini, siswa diberi kebebasan untuk memilih pelajaran sesuai dengan minat mereka, seperti yang diterapkan di negara-negara maju.
- c. Kurikulum ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa melalui pembelajaran yang dibuat lebih sederhana dan fleksibel, sehingga siswa bisa memahami materi dengan lebih mendalam. Kurikulum ini juga menekankan pada materi-materi penting dan sesuai

dengan kebutuhan perkembangan siswa di setiap tahap belajarnya.(Ayi, 2023)

Kurikulum Merdeka Belajar diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan kompetensinya. Selain itu, kurikulum ini memiliki keunggulan karena memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar, dan juga memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran.

Tujuan pendidikan nasional dalam Kurikulum Merdeka Belajar disampaikan melalui Profil Pelajar Pancasila. Profil ini menjadi acuan utama dalam menentukan arah kebijakan pendidikan, termasuk panduan bagi guru dalam membentuk karakter dan kemampuan siswa.

Profil Pelajar Pancasila memiliki enam dimensi utama, yaitu:

- 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar menunjukkan sikap yang baik dalam hubungannya dengan Tuhan dengan memahami, dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Berkebhinekaan global. Pelajar tetap menjaga budaya dan jati diri bangsa, tetapi juga terbuka dan menghargai budaya lain. Hal ini dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, dan

menciptakan budaya baru yang positif tanpa menghilangkan nilai budaya bangsa.

- 3) Gotong royong. Pelajar memiliki semangat bekerja sama dengan orang lain secara sukarela agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih baik.
- 4) Mandiri. Pelajar bertanggung jawab atas proses belajar dan hasil yang dicapainya. Mereka belajar untuk mengandalkan diri sendiri.
- 5) Bernalar kritis. Pelajar mampu mengolah dan menganalisis informasi, baik secara angka maupun secara cerita, kemudian menghubungkan, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi tersebut dengan logis.
- 6) Kreatif. Pelajar mampu membuat atau menghasilkan ide atau karya baru yang bermakna, bermanfaat, dan punya dampak positif.

Selain itu, dalam Kurikulum Merdeka, setiap mata pelajaran harus mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP). CP ini membantu guru menentukan apa saja yang harus dipelajari siswa pada setiap tahap atau fase dalam struktur kurikulum. (Mubarak, 2022)

5. Kelebihan Dan Kelemahan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka sebagai inovasi dalam sistem pendidikan Indonesia memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipahami. Memaksimalkan implementasinya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan:

a. Kelebihan Kurikulum Merdeka

1) Fleksibilitas Pembelajaran

Sekolah dan guru bebas menyesuaikan cara mengajar sesuai kebutuhan dan karakter siswa. Materi bisa disesuaikan dengan kondisi lokal dan minat siswa.

2) Pengembangan Karakter & Soft Skills

Melalui proyek profil pelajar Pancasila, siswa dilatih memiliki karakter baik dan keterampilan penting abad ke-21, misalnya kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas.

3) Keterlibatan Siswa yang Tinggi

Pendekatan belajar yang aktif dan kreatif mendorong siswa lebih mandiri, sehingga motivasi dan partisipasi mereka dalam kelas meningkat.

4) Materi yang Relevan

Materi pelajaran disederhanakan dan difokuskan pada hal yang sehari-hari dan bermanfaat bagi siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan bisa langsung dipakai.

5) Ruang untuk Inovasi Guru

Guru mempunyai kebebasan untuk mencoba metode pengajaran baru, sehingga tercipta cara belajar yang lebih menarik dan efektif.(manao, parulian sijabat, n.d.)

b. Kelemahan Kurikulum Merdeka

1) Kesiapan Sumber Daya

Tidak semua pihak guru, sekolah, orang tua, dan siswa sudah siap menghadapi perubahan cara belajar baru ini. Banyak guru merasa belum cukup paham dan belum siap untuk menerapkan metode berbasis proyek dan diferensiasi pembelajaran.

2) Dukungan Infrastruktur

Kurangnya sarana teknologi (internet, komputer, perangkat interaktif) di sejumlah sekolah, terutama di daerah terpencil dapat menghambat implementasi secara optimal.

3) Sosialisasi dan Pelatihan

Pelatihan dan pendampingan bagi guru masih belum merata serta belum cukup untuk

membekali mereka memahami cara merancang dan menilai pembelajaran sesuai kurikulum.

4) Evaluasi yang Konsisten

Belum ada sistem evaluasi dan pemantauan yang kuat. Tanpa evaluasi berkala, sulit mengetahui sejauh mana tujuan kurikulum tercapai.

5) Beban Kerja Tambahan bagi Guru

Guru harus menyusun modul ajar, rencana proyek, dan asesmen formatif yang lebih personal ini meningkatkan beban kerja mereka.

6) Keterbatasan Referensi & Materi Pendukung

Karena tidak ada buku teks wajib, guru sering kesulitan mencari atau membuat materi yang sesuai dan berkualitas.

7) Kesulitan Adaptasi Paradigma

Peralihan dari pengajaran tradisional ke model pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa (student-centered) memerlukan perubahan pola pikir yang cukup menantang bagi sebagian guru.

6. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar

dalam suatu lingkungan belajar. Dalam proses ini, guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan salah satu dari berbagai sumber yang ada. Guru memiliki peran penting dalam membimbing dan memfasilitasi proses belajar peserta didik. Peran guru dalam pembelajaran meliputi berbagai aspek, antara lain sebagai:

- a. Pengajar: Menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik.
- b. Pemimpin Kelas: Mengelola dan memimpin kegiatan belajar di kelas.
- c. Pembimbing: Membantu peserta didik dalam memahami materi dan mengembangkan potensi diri.
- d. Pengatur Lingkungan: Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran.
- e. Partisipan: Terlibat aktif dalam kegiatan belajar bersama peserta didik.
- f. Ekspeditor: Memfasilitasi dan mempercepat proses pembelajaran.
- g. Perencana: Menyusun rencana pembelajaran yang efektif dan efisien.
- h. Supervisor: Mengawasi dan mengevaluasi proses serta hasil belajar peserta didik.

- i. Motivator: Memberikan dorongan dan semangat kepada peserta didik untuk belajar.
- j. Konselor: Memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dalam menghadapi permasalahan belajar maupun pribadi. (Moh. Uzer Usman, 2001)

Dengan menjalankan berbagai peran tersebut, guru berkontribusi dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik.

Guru memiliki berbagai peran penting dalam mendukung proses belajar siswa. Beberapa peran utama tersebut meliputi:

- 1.) Demonstrator: Guru harus menguasai materi pelajaran yang diajarkan dan terus memperbarui pengetahuannya. Dengan demikian, guru dapat menjelaskan materi dengan jelas dan memberikan contoh nyata agar siswa lebih mudah memahami pelajaran.
- 2.) Pengelola Kelas: Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan kelas yang tertib dan kondusif untuk belajar. Ini mencakup pengaturan tempat duduk, menjaga kebersihan, serta memastikan suasana kelas mendukung konsentrasi dan partisipasi aktif siswa.

- 3.) Mediator dan Fasilitator: Sebagai mediator, guru menjadi penghubung antara siswa dengan berbagai sumber belajar, seperti buku, media digital, atau narasumber lain. Sebagai fasilitator, guru menyediakan berbagai alat bantu dan sumber belajar yang membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, termasuk buku teks, majalah, atau sumber informasi lainnya.
- 4.) Evaluator: Guru secara rutin menilai kemajuan belajar siswa melalui berbagai metode, seperti tes, tugas, atau observasi. Evaluasi ini membantu guru memahami sejauh mana siswa telah memahami materi dan menentukan langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran. (Moh. Uzer Usman, 2001)

Dengan menjalankan peran-peran tersebut secara efektif, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, serta membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal.

7. Guru Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian guru

Dalam bahasa Sansekerta, guru berarti "mentor", "pemimpin", atau "penuntun". Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi sebutan umum bagi seorang guru atau pendidik. Guru merupakan

salah satu unsur kunci, dalam mendidik generasi penerus bangsa. Ini adalah negara yang berkualitas tinggi tidak hanya dari sudut pandang intelektual, tetapi juga dari sudut pandang perilaku sosial. Oleh karena itu, tugas seorang guru yang baik adalah memahami dan memahami hakikat guru. Hal ini dapat dilihat dari pengertian dan pengertian istilah guru itu sendiri. Moh Uzzar Usman menjelaskan guru adalah orang yang mempunyai tugas dan wewenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran dilembaga pendidikan formal. Guru sekolah dasar adalah guru yang mengajar kelas dan mengelola pendaftaran di sekolah tersebut (Ali, 2018).

Untuk melaksanakan tugasnya prinsip-prinsip tentang tingkah laku yang diinginkan dan diharapkan dari semua situasi pendidikan adalah berjiwa pancasila. Berilmu pengetahuan dan keterampilan dan menyampaikan serta dapat dipertanggung jawabkan secara didaktis dan metodis. Sebagai profesi, guru memenuhi ciri atau karakteristik yang melekat pada guru, yaitu:

- 1) Memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

- 2) Menurut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Memiliki kopotensi yang didukung oleh suatu disiplin ilmu.
- 4) Memiliki kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta seksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik tersebut.

Sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok berhak memperoleh imbalan finansial atau material (Muchith, 2017).

Agar lebih mudah memahami konsep guru, maka dapat merujuk pada pendapat beberapa para ahli yaitu: (Safitri, 2019)

- 1) Dri. Atmaka

Menurut Dri. Atmaka, guru atau pendidik merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada peserta didik dalam pengembangan baik fisik maupun mental.

- 2) Husnul Khotimah

Husnul Khotimah mengatakan bahwa guru merupakan orang yang berperan memfasilitasi dalam proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik.

3) Ngalim Purwanto

Menurut Ngalim Purwanto, guru merupakan orang yang memberikan ilmu atau pengetahuannya kepada seseorang maupun sekelompok orang.

4) Mulyasa

Menurut Mulyasa, guru merupakan orang yang mempunyai kualifikasi akademik serta kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani serta rohani, serta mampu mewujudkan pendidikan nasional.

5) Drs. M. Uzer Usman

Menurut Drs. M. Uzer Usman guru merupakan orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal.

b. Pengertian pendidikan agama islam

Dilihat dari konsep pendidikan agama Islam, pendidikan Islam dikenal dengan istilah Tarbiyyah Ta'lim dan Ta'dib. Tiga kata yang

paling sering didengar atau dibaca oleh para profesional ini berkaitan dengan konsep pendidikan Islam (Firmansyah, 2019).

1) Pengertian Tarbiyah

Dalam beberapa nash, kata Tarbiyah mempunyai banyak pengertian yang pada hakikatnya mengarah pada satu pengertian: proses pengembangan potensi yang diberikan kepada manusia. Menurut Tabari, tarbiyah merupakan suatu proses yang mengembangkan dan membimbing tubuh. Hati dan jiwa Mutarabi (siswa) yang terus menerus dilakukan agar menjadi dewasa, mandiri, dan hidup bermasyarakat (Syihabudin, 2019).

2) Pengertian Ta'lim

Ta'lim merupakan kata benda yang berasal dari kata Masdar atau dari kata Allama. Arti kata ta'lim adalah mengajar. Muhammad Rashid Ridha mengartikan ta'lim sebagai “proses transmisi (transformasi) berbagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat tanpa adanya batasan atau aturan khusus”. Menurut M. Nasir Budiman, istilah tarianm mencakup aspek pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki seseorang. Untuk menunjang kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Ta'lim adalah suatu proses yang terus dilakukan dan diperjuangkan manusia sejak lahir. Mereka dilahirkan tanpa mengetahui apapun tentang tabula rasa atau semacamnya (Syamsi, 2018).

3) Pengertian Ta'dib

Kata Ta'dib menurut Al-Attas berasal dari kata addaba yang berarti pendidikan. Kata ta'dib berarti pendidikan dan mencakup ilmu dan amal yang merupakan hakikat pendidikan Islam (M. Muhtar Sarjuni, 2023).

Pendidikan merupakan tiap usaha guna membina serta memusatkan kemampuan akal, jiwa serta jasmaninya, sehingga ia mempunyai ilmu, akhlak serta keahlian yang semua ini dapat digunakan untuk menunjang tugas dedikasi dan kekhalfannya. (Nata, 2019) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 pendidikan merupakan pendidikan.

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, meghayati,

hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Disertai dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Nugraha, 2019).

Omar Muhammad al-Toumi, al-Shaybani yang dikutip oleh Abidin Nata mengatakan, pendidikan sebagai suatu kegiatan yang mendasar dan melalui pengajaran sebagai salah satu kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kehidupan individu, masyarakat dan lingkungan suatu proses perubahan perilaku dasar-dasar pekerjaan umum (Nata, 2016).

c. tujuan pendidikan agama islam

Secara umum Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman siswa mengenai agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Agama Islam, diharapkan mampu membentengi siswa dari berbagai pengaruh negatif lingkungan, sekaligus menjadi agen sosial menuju masyarakat yang lebih beradab (Andi Abdul Razak, 2019).

Dalam PP No. 55 Tahun 2007 Bab I pasal 1 mengemukakan, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Bab II pasal 2, menjelaskan: (1) pendidikan agama berfungsi membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, (2) pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya

dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Daulay, 2016).

Menurut Ahmad Tafsir, ada 3 tujuan Pendidikan Agama Islam, yaitu :

- 1) Terwujudnya insan kamil, sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi, Terciptanya insan kaffah, yang memiliki tiga dimensi (religious, budaya dan ilmiah)
- 2) Terwujudnya penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, pewaris para nabi dan memberikan bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut.

Sedangkan menurut Darajat, tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah, yaitu :

- 1) Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap siswa yang positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan sebagai esensi takwa, taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik siswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka sadar akan iman, ilmu dan pengembangannya untuk mencapai keridhaan Allah Swt.

- 3) Menumbuhkan dan membina siswa dalam memahami agama secara benar dan dengannya pula diamalkan menjadi keterampilan beragama dalam berbagai dimensi kehidupan (Firmansyah, 2019).

d. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Sebagai suatu mata pelajaran, fungsi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Ada beberapa fungsi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah, yaitu: (Wiyani, 2012)

- 1) Pengembangan, yaitu peserta didik mampu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.

- 2) Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat.
- 3) Penyesuaian mental, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Pencegahan, yaitu untuk menangkap hal-hal negative dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- 6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata). Sistem dan fungsionalnya.
- 7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat

dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.

8. Langkah-Langkah Penerapan Kurikulum Merdeka

Penerapan kurikulum dalam pembelajaran merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. (Sunhaji, 2016) Berikut langkah-langkah penerapan kurikulum merdeka:

a. Tahap Perencanaan

Dalam merancang merdeka belajar tidak hanya menyusun program pembelajaran, namun sebelum menyusun program pembelajaran ada hal yang harus di perhatikan seperti: menganalisis kebutuhan peserta didik selain itu juga mengidentifikasi kompetensi yang di sesuaikan dengan peserta didik.

b. Tahap Pelaksanaan

Menurut Freire (dikutip oleh Mulyasa), pembelajaran yang mendidik dan bersifat dialogis merupakan tanggapan terhadap sistem pendidikan yang terputus dari kenyataan nyata. Model seperti ini, diarahkan agar siswa mampu menghadapi permasalahan secara langsung dalam pelaksanaannya, guru memiliki peran penting

menciptakan suasana belajar yang nyaman.(Amalia, 2022) Dilingkungan yang nyaman, peserta didik lebih mudah menerima materi dan aktif dalam diskusi.

Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran inti, adalah kegiatan pembelajaran itu sendiri, yang harus dibuat nyaman dan menyenangkan karena prosesnya sangat memengaruhi hasil belajar. Kualitas pembelajaran yang baik tercapai, saat peserta didik aktif, bersemangat, dan percaya diri. Untuk meraihnya, pendidik perlu menerapkan strategi dan metode menarik. Selain itu, dalam pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning/PJBL), guru juga menyisipkan dimensi Profil Pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan pembelajar berbasis proyek memiliki 3 tahapan, yaitu:

1.) Tahap Permulaan

Menetapkan tema atau proyek yang relevan dan bermakna serta sesuai minat dan kontekstual peserta didik. Merancang pertanyaan esensial yang memancing rasa ingin tahu siswa dan arahan menuju permasalahan nyata.

2.) Tahap Pengembangan

Merencanakan kegiatan dan jadwal proyek bersama siswa (pembagian peran, persiapan alat-bahan, timeline). Melaksanakan dan memantau proyek secara aktif: guru memfasilitasi, memonitor kemajuan, serta siswa mendokumentasi proses yang mereka jalani.

3.) Tahap Penyimpulan

Siswa mempresentasikan hasil produk atau laporan mereka kepada guru dan teman (melibatkan umpan balik). Dilakukan refleksi dan evaluasi: siswa dan guru meninjau proses dan hasil, menentukan apa saja yang perlu diperbaiki dan dipelajari lebih lanjut .

Pembelajaran berbasis proyek (PJBL) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja sama, sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing, melalui eksplorasi aktif.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan secara sistematis, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan data yang valid dan reliabel. Tujuannya adalah menilai

efektivitas, efisiensi, dan relevansi perencanaan serta pelaksanaan kurikulum dilembaga tersebut.

Dalam mengevaluasi pembelajaran dapat ditinjau dari 3 komponen, yaitu:

1.) Asesmen Pembelajaran

Proses untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data yang valid dan reliabel guna menilai hasil belajar siswa, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

2.) Penggunaan Perangkat Ajar

Meliputi semua media, alat, dan materi pembelajaran yang digunakan guru mulai dari RPP, bahan ajar, hingga instrumen asesmen yang menjadi dasar penilaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kurikulum.

3.) Kurikulum Operasional Sekolah (KOS)

Dokumen dan panduan operasional lokal yang memuat strategi, struktur, dan regulasi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Evaluasi terhadap KOS memastikan relevansi dengan kebutuhan siswa dan konteks lembaga. (Mulyasa, 2022)

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan akan dipaparkan untuk mendukung dasar teori, dan tujuan penelitian tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP PGRI Air Beliti, Kec. Tuah Negeri, Kab Musi Rawas:

1. Jurnal yang dibuat oleh Ahmad Rifa'i, N. Elis Kurnia Asih, dan Dewi, Fatmawati, pada tahun 2022 yang berjudul: Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran PAI di Sekolah. (Rifa'i, 2022) Dalam jurnal tersebut, tiga penulis menjelaskan hasil penelitian mereka mengenai penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan di sekolah. Data utama dalam penelitian ini, diperoleh melalui observasi langsung, jurnal, dan karya ilmiah lainnya sebagai sumber primer. Selain itu, mereka juga menggunakan artikel dari internet sebagai sumber sekunder. Perbedaan utama antara penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada teknik pengumpulan data. Penelitian ini, menggunakan observasi langsung, sedangkan penelitian yang

direncanakan akan menambahkan metode wawancara dan angket kepada guru serta siswa untuk memahami lebih dalam tentang penerapan Kurikulum Merdeka.

2. Jurnal yang ditulis oleh Sri Apriatni, Novaliyosi, Hepsi Nindiasari, dan Sukrwan pada tahun 2023 yang berjudul: Analisis Kesiapan Madrasah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Studi di MAN 2 Kota Serang).(Apriatni, 2023) Dalam jurnal tersebut, peneliti melakukan studi di MAN 2 Kota Serang untuk mengetahui sejauh mana madrasah tersebut siap menerapkan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan metode angket dan wawancara untuk mengumpulkan data dari guru, kepala madrasah, dan wakil kepala bidang kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan madrasah berada pada tingkat "cukup" secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran: tingkat kesiapan "cukup".
- b. Proses pembelajaran: tingkat kesiapan "cukup".
- c. Proses penilaian: tingkat kesiapan "kurang".

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokusnya. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi Kurikulum

Merdeka, sedangkan penelitian yang direncanakan akan meneliti faktor-faktor tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

3. Jurnal yang dibuat oleh Ayu lestari, Muamar AL Qadri, dan Marhan Hasibuan pada tahun 2022 yang berjudul: Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum Merdeka Dalam Menumbuhkan Pendidikan Karakter Mata Pelajaran Akidah Ahlak Siswa Kelas X MAN 1 langkat. (Lestari, 2022) Dalam jurnal tersebut, peneliti melakukan studi di MAN 1 Langkat untuk memahami bagaimana penilaian autentik diterapkan dalam mata pelajaran Akidah Akhlak bagi siswa kelas X. Penilaian autentik ini mencakup tiga aspek utama:
 - a. Aspek Pengetahuan (Kognitif): Guru menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.
 - b. Aspek Sikap (Afektif): Penilaian dilakukan melalui observasi langsung oleh guru terhadap sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran.
 - c. Aspek Keterampilan (Psikomotorik): Siswa diminta untuk menunjukkan keterampilan mereka secara langsung melalui unjuk kerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan selama pembelajaran berlangsung.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokusnya. Penelitian ini hanya menyoroti aspek implementasi penilaian autentik dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, sementara penelitian yang direncanakan akan mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan penilaian autentik tersebut.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis dalam berfikir dan menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam proposal ini. Gambaran mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP PGRI Air Beliti Kec Tuah Negeri Kab Musi Rawas.

Kerangka berpikir itu sangat penting untuk membantu dan mendorong peneliti memusatkan usaha penelitiannya untuk memahami hubungan antara variabel tertentu yang telah dipilihnya, mempermudah peneliti memahami dan menyadari kelemahan dan keunggulan dari penelitian yang dilakukannya dibandingkan penelitian terdahulu. Untuk itu sebagai gambaran mengenai arah dan tata fikir penulis dalam kaitannya dengan topik pembahasan penelitian ini, maka penulis melampirkan bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

Bagan 2.1 Bagan kerangka berfikir